



Hambatan dan Inovasi Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Laporan Keuangan

Jelita Yulianti Br Sitanggang

jelitayulianti027@gmail.com

Universitas Negeri Medan

Lestari Br Tohang

lestaribrtohang@gmail.com

Universitas Negeri Medan

Yuliana Simatupang

yulianasimatupang64@gmail.com

Universitas Negeri Medan

Nasirwan

nasirwan@unimed.ac.id

Universitas Negeri Medan

1. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Abstract. *This study discusses the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in government financial reports and the challenges in its implementation. SAP plays a role in creating a financial system that is transparent, accountable, and in accordance with good governance. However, its implementation faces obstacles such as limited human resources, resistance to change, and the complexity of regulations at the central and regional levels. The lack of understanding of SAP by state officials is an obstacle due to the lack of training and certification. In addition, the work culture that has been formed and the lack of socialization have made many agencies still maintain conventional reporting systems that are less transparent. The complexity of regulations is also a challenge for local governments in adopting this standard optimally. To overcome these obstacles, it is necessary to increase the capacity of human resources through training and certification, the use of digital technology in accounting systems, and digital-based applications for real-time monitoring of financial reports. This step aims to increase the effectiveness, efficiency, and transparency in state financial management. The success of SAP implementation depends on the readiness of human resources, management support, and technology in financial recording and reporting. Optimizing SAP will improve the quality of government financial reports, support better governance, and increase public trust in state financial management*

Keywords: *Accountability, Digital Innovation, Government Accounting Standards, government financial reports, transparency*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangan pemerintah serta tantangan dalam penerapannya. SAP berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penerapannya menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta kompleksitas aturan di tingkat pusat dan daerah. Minimnya pemahaman aparatur negara terhadap SAP menjadi kendala akibat kurangnya pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, budaya kerja yang telah terbentuk dan minimnya sosialisasi membuat banyak instansi masih mempertahankan sistem pelaporan konvensional yang kurang transparan. Kompleksitas regulasi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengadopsi standar ini secara optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem akuntansi, serta aplikasi berbasis digital untuk monitoring real-time laporan keuangan. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan implementasi SAP bergantung pada kesiapan SDM, dukungan manajemen, serta teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Optimalisasi SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, mendukung tata kelola yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara

Kata kunci: Akuntabilitas, Inovasi digital, Standar akuntansi pemerintah, Laporan keuangan pemerintah, Transparansi akuntabilitas

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berbasis pemerintahan dimana setiap lembaga pemerintahan harus memiliki kinerja yang baik disegala bidang khususnya pengelolaan keuangan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang memadai, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, khususnya dibidang akuntan publik, diperlukan reformasi dan pengembangan yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem yang sesuai.

Meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam terkait SAP.

Hambatan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa instansi masih menerapkan sistem pelaporan keuangan yang konvensional dan belum sepenuhnya beralih ke sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh budaya kerja yang sudah lama terbentuk serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya penerapan SAP. Selain itu, kompleksitas aturan yang terdapat dalam SAP juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan dalam memahami dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan berbagai inovasi dalam implementasi SAP terhadap laporan keuangan pemerintah. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur negara, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi SAP. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat membantu mempermudah pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan transparansi. Pemerintah juga dapat mengembangkan aplikasi yang memungkinkan monitoring real-time terhadap laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses audit dan pengawasan.

Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, diharapkan implementasi SAP dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

KAJIAN TEORITIS

A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. SAP bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya SAP, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang andal bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

SAP adalah sistem akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab. Tujuan utama SAP adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, menyediakan informasi yang andal dan relevan, mencegah potensi penyimpangan dalam pencatatan keuangan, serta mempermudah analisis dan perbandingan laporan keuangan antarinstansi.

Di Indonesia, SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, yang mengadopsi sistem berbasis akrual. SAP berbasis akrual digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah dengan mencatat transaksi keuangan saat terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, terdapat SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), yang masih menggunakan pencatatan berbasis kas tetapi memberikan informasi tambahan berbasis akrual. Dengan penerapan regulasi ini, laporan keuangan pemerintah diharapkan lebih transparan dan dapat menjadi dasar dalam perencanaan serta evaluasi keuangan negara.

B. Hambatan dalam Implementasi SAP

Meskipun SAP memiliki banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan negara, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan SAP antara lain keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi SAP adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem akuntansi pemerintahan. Banyak aparatur negara yang belum mendapatkan pelatihan atau sertifikasi yang memadai dalam bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan kompetensi antara pegawai pemerintah pusat dan daerah menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan SAP, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Perubahan dalam sistem pelaporan keuangan sering kali menghadapi hambatan dari para pegawai yang masih terbiasa dengan metode konvensional. Budaya kerja yang sudah terbentuk

sejak lama membuat banyak instansi masih menggunakan sistem pencatatan manual yang kurang transparan. Kurangnya sosialisasi dan dorongan dari manajemen dalam penerapan SAP juga menjadi faktor utama mengapa banyak instansi enggan beralih ke sistem yang lebih modern dan akuntabel.

Aturan dalam SAP sering dianggap terlalu kompleks dan sulit dipahami, terutama oleh pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap bimbingan teknis. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi akuntansi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan antarinstansi. Regulasi yang terus mengalami perubahan juga membuat instansi pemerintah kesulitan dalam menyesuaikan sistem pelaporan mereka sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan SAP. Banyak instansi yang masih menggunakan sistem pencatatan manual karena tidak memiliki perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan standar SAP. Selain itu, kurangnya anggaran untuk pengadaan teknologi serta minimnya pelatihan dalam penggunaan sistem digital semakin memperlambat proses digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintahan.

C. Inovasi dalam Implementasi SAP

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan SAP, diperlukan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Inovasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, reformasi regulasi dan kebijakan, serta penguatan pengawasan dan audit.

Pemerintah perlu mengadakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur negara di bidang akuntansi pemerintahan agar mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dalam penerapan SAP. Selain itu, pemberian insentif bagi pegawai yang memiliki sertifikasi akuntansi dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan keahlian mereka di bidang ini. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga profesi juga dapat membantu dalam menyediakan pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai pemerintahan.

Teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi SAP. Pemerintah dapat mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan (SIAP) yang berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pencatatan serta pelaporan keuangan. Selain itu, penggunaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya sistem monitoring real-time juga memungkinkan pengawasan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi SAP, regulasi yang ada perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi perbedaan dalam penerapan standar akuntansi. Selain itu, perlu adanya pendampingan teknis secara intensif dari pemerintah pusat ke daerah untuk mempercepat implementasi SAP secara optimal.

Peningkatan pengawasan dan audit sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap SAP dalam laporan keuangan pemerintah. Audit berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah perlu diperkuat agar implementasi SAP dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap regulasi terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas hambatan dan inovasi dalam implementasi SAP.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh akan diklasifikasikan, dianalisis, dan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual implementasi SAP dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan SAP serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan serta solusi dalam implementasi SAP, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi literatur dan analisis terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam laporan keuangan pemerintah, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi penerapan SAP. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam terhadap SAP. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aparatur negara yang belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang cukup mengenai penerapan SAP. Beberapa pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam memahami standar yang

ditetapkan, terutama dalam menyesuaikan laporan keuangan mereka dengan regulasi yang terus berkembang.

Selain itu, faktor budaya organisasi juga menjadi tantangan dalam penerapan SAP. Beberapa instansi pemerintahan masih cenderung mempertahankan sistem pelaporan keuangan yang konvensional dan belum sepenuhnya beralih ke sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Resistensi terhadap perubahan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penerapan SAP serta kurangnya dukungan dari pihak manajemen dalam mendorong transformasi sistem pelaporan keuangan. Dalam beberapa kasus, perubahan kebijakan dalam penerapan SAP belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam prosedur kerja instansi pemerintahan, sehingga transisi menuju sistem yang lebih baik berjalan dengan lambat.

Hambatan lainnya adalah kompleksitas aturan yang terdapat dalam SAP, yang sering kali menjadi kendala dalam implementasi di tingkat daerah. Beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem pelaporan keuangan mereka dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang berlaku serta keterbatasan akses terhadap bimbingan teknis yang memadai. Akibatnya, banyak pemerintah daerah yang masih melakukan pencatatan keuangan secara manual atau dengan metode yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, berbagai inovasi dalam implementasi SAP diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif bagi aparatur negara, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai SAP. Selain itu, perlu adanya mekanisme insentif bagi pegawai yang memiliki sertifikasi atau keahlian di bidang akuntansi pemerintahan guna mendorong peningkatan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi solusi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi SAP. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat membantu mempermudah pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan transparansi. Beberapa pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mendorong digitalisasi sistem akuntansi di seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun

daerah, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung penggunaan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Selain itu, inovasi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan monitoring real-time terhadap laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem ini, proses audit dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dapat mendeteksi ketidaksesuaian atau potensi kesalahan dalam laporan keuangan dengan lebih cepat. Penerapan sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan serta mempercepat proses pelaporan kepada pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, implementasi SAP yang optimal akan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan dari pihak manajemen, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, diharapkan implementasi SAP dapat berjalan lebih baik, sehingga laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berperan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas aturan SAP yang menyulitkan adopsi di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta pengembangan aplikasi monitoring real-time guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Keberhasilan implementasi SAP sangat bergantung pada kesiapan SDM, dukungan manajemen, dan optimalisasi teknologi. Dengan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat lebih transparan, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR REFERENSI

Lelono, W., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Atas Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada BLUD Puskesmas Kawasan Terpencil. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(4), 538-565.

- Lestari, F. (2023). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai PSAP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di kantor Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1211-1221.
- Sholihat, W., & Hairudin, A. (2021). Analisis Implementasi Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK-EMKM)(Studi Kasus Pada UMKM 7 Saudara). *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 1(1), 70-79.
- Sinurat, M., Putri, R. S. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89-105.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 44-58.
- Lelono, W., & Siswanto, D. (2023). Evaluasi Atas Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada BLUD Puskesmas Kawasan Terpencil. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(4), 538-565.
- Yahya, K., & Nasution, J. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(1), 15-22.
- Malviki, M. A. D. (2021). *Penyajian Laporan Keuangan Dengan Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA).
- Rosmala, C. (2024). Inovasi Akuntansi Dalam Era Digital Strategi Peningkatan Efisiensi Laporan Keuangan. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 3(1), 1-10.
- Tantri, N. A., Menne, F., & Thanwain, T. (2023). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 1(3), 136-141.
- Lelono, W., & Siswanto, D. (2023). *Evaluasi Atas Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada BLUD Puskesmas Kawasan Terpencil*.
- Sinurat, M., et al. (2023). *Penerapan SAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu*.
- Yahya, K., & Nasution, J. (2022). *Implementasi SAP Berbasis Akrual di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara*.